

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa dianggap menjadi ujung tombak untuk mencapai salah satu tujuan nasional Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan desa yang digalakkan ini sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo. Nawacita yang dimaksud yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, semua kebijakan yang terkait dengan desa perlu dikaji secara komprehensif.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tercantum hal-hal mengenai Dana Desa. Dana ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terhitung sejak 2015 alokasi dana tersebut diketahui sangat besar jumlahnya dan semakin besar tiap tahunnya. Melalui mekanisme dan formulasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Dinas terkait dilaporkan bahwa pada tahun 2015, total Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Total dana tersebut meningkat drastis menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 dan 2018 total Dana Desa yang sudah terkucur kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (APBN, 2017).

Berdasarkan pernyataan resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI yang dipublikasikan melalui Laporan Kajian 2017 oleh APBN (2017), pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, dana yang dikucurkan tersebut seharusnya menjadi alternatif solusi yang sangat efektif untuk mencapai salah satu fokus tujuan kebijakan itu sendiri ditetapkan yakni semakin mudahnya pengentasan kemiskinan di desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dalam pengentasan kemiskinan, desa tidak hanya mendapatkan dana segar berupa Dana Desa saja tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut PP tersebut Alokasi Dana Desa adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADD tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan penghasilan perangkat desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa tetapi juga mempertimbangkan angka kemiskinan desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sangat dimungkinkan untuk membantu pemerintah desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan. Jika dilihat dari besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan maka dapat dikatakan bahwa ADD merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa terkhusus yang terkait dengan pengentasan kemiskinan (Abidin, 2015 dalam Sari, 2017). Namun, seiring dengan besarnya total anggaran Alokasi Dana Desa ini, masalah kemiskinan di desa cenderung masih sulit untuk diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017) menunjukkan bahwa Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil mengurangi kemiskinan desa hanya pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung dari 127 desa yang menjadi objek penelitian. Hal ini terjadi karena sejumlah besar dana segar tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana fisik perdesaan, sementara penggunaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas ditunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencoba untuk memperbesar kapasitas fiskal bagi desa dalam

pengelolaan dana yang sangat besar tersebut. Pengelolaan Dana Desa ini dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Pejabat Desa dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Desa masing-masing. Pengentasan kemiskinan dengan instrumen kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjelaskan tentang seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Husein dalam tulisan Kepahiang (2019) menjelaskan bahwa masalah terbesar dalam hal pengentasan kemiskinan yang berasal dari pendanaan pusat dan pendanaan daerah ini adalah yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Pernyataan yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah:

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah dana desa adalah SDM (Sumber Daya Manusia). Rata-rata kepala desa berpendidikan menengah ke bawah. Sementara mereka dipaksa mengelola kucuran dana desa. Untuk kepala desa diberikan pelatihan dan Pendampingan memadai (Kepahiang, 2019).

Hal ini didukung oleh Widodo (2015) yang menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh SDM yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. SDM desa yang berkompeten ini nantinya dapat melakukan pengelolaan dana yang diperoleh dalam upaya mencapai tujuan dana tersebut diberikan. Salah satu dari tujuan yang ada yaitu mengentaskan kemiskinan di desa.

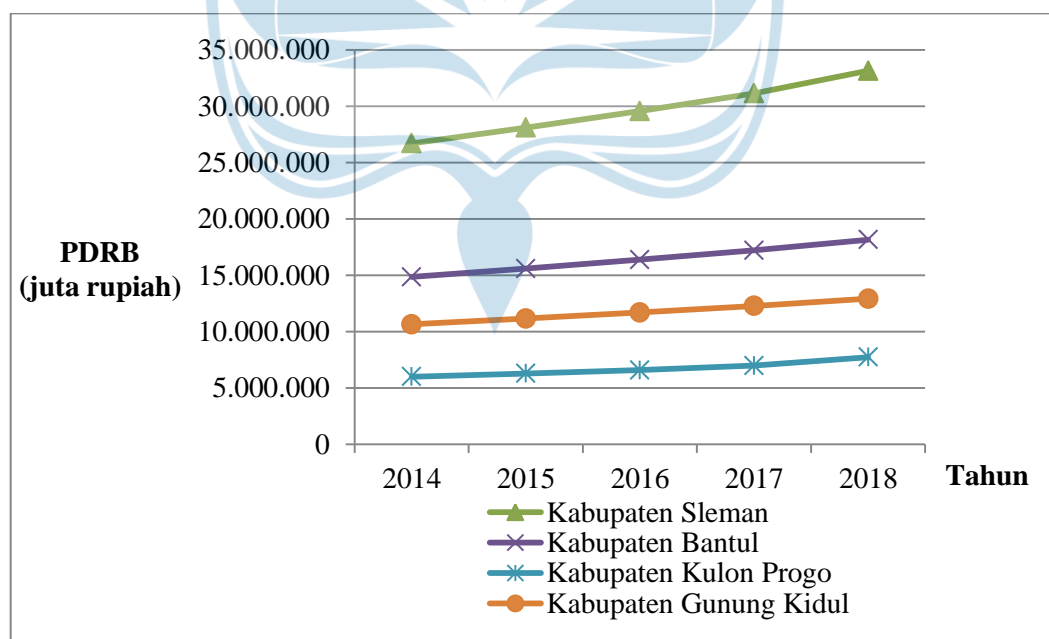
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2013) untuk melihat gambaran mengenai kualitas SDM sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh

karena itu, IPM yang tinggi dapat menunjukkan kompetensi yang tinggi pula dari pihak Pemerintah Desa dalam mengelola dana dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan yang ada di desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta) dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Yogyakarta sebagai daerah yang menyandang status sebagai kota pelajar memiliki IPM mencapai 79,53. Tertinggi kedua setelah DKI Jakarta pada tahun 2018. Berdasarkan indeks tersebut, dikatakan bahwa SDM dengan kualitas yang tinggi ini seyogianya mampu berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga pada akhirnya berdampak positif pula pada pengentasan kemiskinan di Yogyakarta. Namun, kondisi yang terjadi ialah Yogyakarta berada pada peringkat kemiskinan yang tertinggi dibandingkan dengan Provinsi (Daerah) lain di Pulau Jawa per Maret 2019 dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,7 persen seperti yang dilansir oleh Jayani dan Widowati (2019). Hal ini menunjukkan bahwa IPM Yogyakarta, yang termasuk dalam kriteria tinggi, belum tentu dapat menjamin suatu provinsi (daerah) memiliki pengelolaan keuangan yang optimal khususnya di desa jika diukur dengan jumlah kemiskinan yang relatif rendah.

Kabupaten Sleman dipilih sebagai objek yang diteliti karena kabupaten ini memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun terbesar yaitu sebesar 1,410 persen dan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.076 jiwa per km² pada tahun 2017 dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta. Jumlah penduduk yang semakin besar ini dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Didu dan Fauzi (2017).

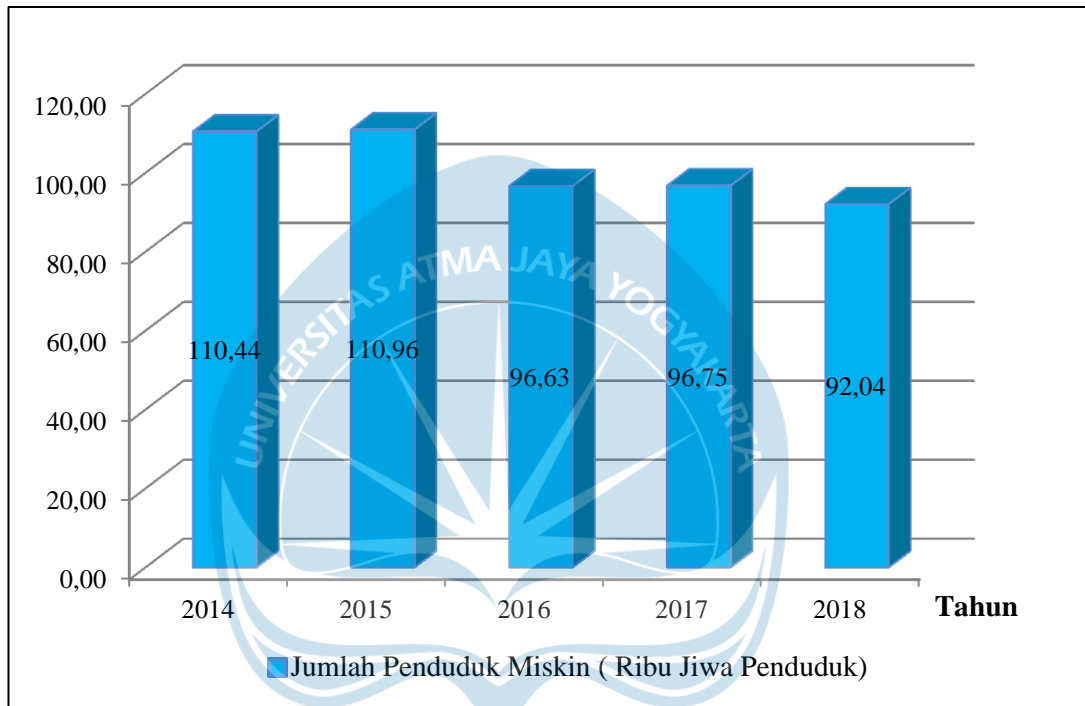
Jika dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka Kabupaten Sleman memiliki PDRB terbesar relatif terhadap kabupaten lainnya di Yogyakarta. Hasil penelitian oleh Susilowati, dkk. (2017) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat satu faktor pendukung bagi Kabupaten Sleman untuk mengentaskan kemiskinan. PDRB tersebut dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. PAD ini dapat berdampak positif terhadap iklim perekonomian seperti peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Sleman. Lapangan kerja yang tercipta di kabupaten tersebut nantinya secara relatif akan menyerap tenaga kerja yang diharapkan berasal dari kabupaten yang sama pula sehingga menurunkan angka kemiskinan.



Sumber: BPS, data diolah peneliti

Gambar 2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Yogyakarta tiap Kabupaten
tahun 2014 - 2018

Laju pertumbuhan PDRB tersebut juga cenderung bersifat eksponensial dibandingkan kabupaten lainnya yang dimungkinkan adanya pengaruh besar dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat bagi tiap desa yang akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.



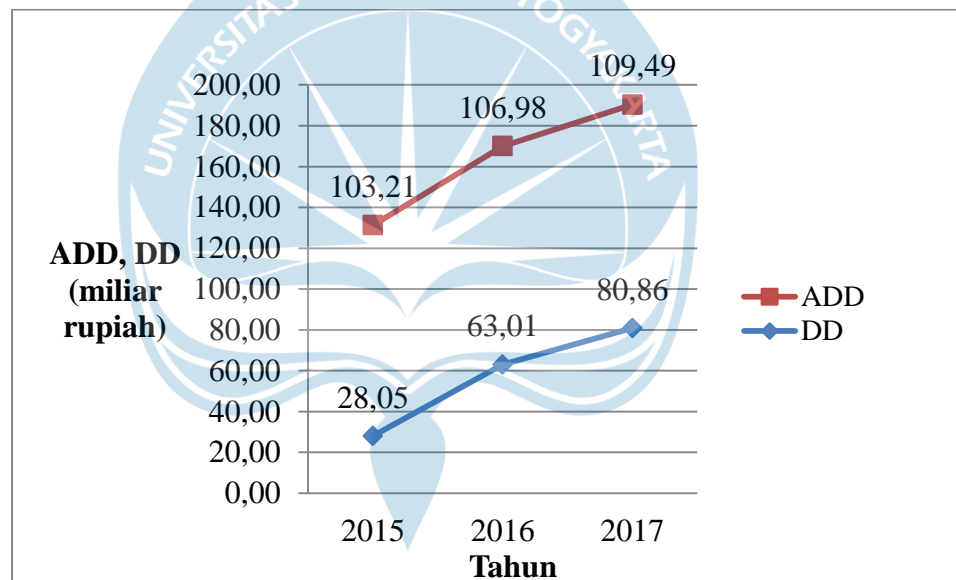
Sumber: BPS, Susenas Maret 2014 – Maret 2018

Gambar 3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman
tahun 2014 - 2018

Kondisi yang terjadi secara agregat pada tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan bahkan cenderung mengalami penurunan yang sangat lambat di tiap desa di Kabupaten Sleman. Hal ini diperkuat dengan data pada Gambar 3 yaitu jumlah penduduk miskin yang tetap berada pada tingkat lebih dari 90 ribu orang sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 meningkat dari

96.630 penduduk miskin menjadi 96.750 penduduk miskin dan menurun kembali di tahun 2018 namun pada angka yang relatif stagnan yaitu tetap di atas 92 ribu penduduk miskin. Keadaan ini berbeda dengan keadaan yang ada di kabupaten lain yang masing-masing memiliki jumlah penduduk miskin yang menurun pada saat yang sama.

Sementara itu, jumlah ADD dan DD yang dikelola oleh keuangan Desa semakin meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 seperti yang ditunjukkan Gambar 4.



Sumber: Statistik resmi Kabupaten Sleman (2019), data diolah peneliti

Gambar 4
ADD dan DD di Kabupaten Sleman
tahun 2015 - 2017

Jika dilihat dari peraturan yang berlaku, ADD cukup besar dan lebih besar dibandingkan dengan DD yang diterima Kabupaten Sleman sehingga dapat dikatakan bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Pemerintah Desa cukup besar seperti yang termaktub dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Penghasilan tetap

dan tunjangan yang ada di dalam PP tersebut dapat menjadi insentif yang baik bagi Perangkat Desa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di desa- desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Desain transfer bagi daerah harus memberikan semacam insentif dengan manajemen fiskal yang baik (Fuad *et al.*, 2004 dalam Abidin, 2015). Hal ini dimaksudkan juga agar menangkai terjadinya praktik-praktik inefisiensi kelembagaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamim, dkk. (2019) menjelaskan bahwa meskipun Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dianggarkan untuk masing-masing desa di Kabupaten Sleman semakin bertambah setiap tahun serta mampu meningkatkan aset desa, namun di sisi lain peningkatan tersebut tidak serta merta mampu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di masing-masing kecamatan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh penyerapan Dana Desa yang lebih mementingkan sektor infrastruktur alih-alih menunjang program guna memberdayakan masyarakat.

Berbagai program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk yang berupa transfer dana ke desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan tiap desa, perlu dikaji lebih dalam. Pengkajian yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan tiap desa yang ada di Kabupaten Sleman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan tiap Desa di Kabupaten Sleman tahun 2015-2018?
- 2) Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan tiap Desa di Kabupaten Sleman tahun 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan tiap Desa di Kabupaten Sleman tahun 2015-2018.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan tiap Desa di Kabupaten Sleman tahun 2015-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa khususnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- 2) Masyarakat, sebagai salah satu bentuk bahan kajian dan sosialisasi kebijakan terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga berguna agar masyarakat lebih mengetahui dan memanfaatkan secara optimal kebijakan fiskal ini demi mengatasi kemiskinan yang ada di Desa.
- 3) Peneliti, sebagai salah satu bentuk bahan referensi dalam mengkaji kemiskinan tiap Desa di suatu Kabupaten dengan menggunakan variabel bebas berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tiap Desa.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan kajian empiris dalam seluruh studi dan fakta yang telah dipaparkan. Maka jawaban sementara atas masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan tiap desa di Kabupaten Sleman.
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan tiap desa di Kabupaten Sleman.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan studi empiris terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dasar penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi riset, jenis data, sumber data, model penelitian, alat analisis dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu mengenai pengaruh parsial dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan tiap Desa di Kabupaten Sleman.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.

